ABSTRAK

Perkembangan teknologi mengakibatkankebutuhan sehari-hari manusia tidak lepas dari penggunaan produk telematika untuk kegiatannya sehari-hari. Kemajuan dalam kegiatan perdagangan memberi dampak tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha. Pelaku usaha harus memiliki strategi mengembangkan produknya. Strategi yang tidak bertanggung jawab pun kerap digunakan dan berujung merugikan konsumen.Untuk menghindari akses negatif para pelaku usaha maka dibutuhkan garansi pada produk tersebut, untuk mengklaim garansi tersebut maka dibutuhkanlah kartu garansi. Mengingat pentingnya kartu garansi, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur kewajiban pencantuman kartu garansi pada produk telematika yang dijual di pasar dalam negeri. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan faktor penyebab masih beredarnya produk telematika impor tanpa disertai kartu garansi pada pasar dalam negeri serta untuk menganalisis dan merumuskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk telematika tanpa disertai kartu garansi.

Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatanyuridis empiris, artinya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data obyektif yang merupakan data primer. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, metode yang digunakan untuk menganalis data dilakukan secara kualitatif, dalam penulisan skripsi ini data disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil: faktor penyebab masih beredarnya produk telematika tanpa disertai kartu garansi adalah sikap konsumen yangkurang kritis dan peduli, permintaan yang banyak dari konsumen dengan harga yang murah, pelaku usaha yang cenderung ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, pelaku usaha yang tidak patuh pada peraturan, pengawasan dan sumber daya yang kurang dari pemerintah.. Kedua, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk telematika impor tanpa disertai kartu garansi yaitu dengan tanggung jawab untuk melakukan penggantian barang sejenis, penerapan sanksi bagi pelaku usaha, penyelesain apabila terjadi sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dan kerjasama pihak terkait.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk, Telematika, Impor, Kartu Garansi